

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Pembentukan kemudian penumbuhan karakter Aparatur Sipil Negara begitu penting, yang selanjutnya dapat disebut sebagai ASN, hal demikian dikarenakan karakter berperan sebagai *ethic is the study of rights and wrong* yakni salah dan benarnya tindakan manusia, *ethic study of moral* berkaitan dengan pandangan moral manusia, dan *ethics is not the study of what is but of what ought be* berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan (Ismail Nurdin, 2017 :2). Aparatur Sipil Negara atau disebut dengan ASN. Untuk melihat secara operasional pembentukan karakter ASN dapat dilihat dalam tiga perspektif yakni Pertama, Deontologis pembentukan karakter bersumber pada hukum, prinsipil, dan norma yang objektif. Kedua, Teologis berfikir lebih jauh sebagai ukuran terakhir. Ketiga, Kontekstual, secara nyata paling pantas dan paling bisa dipertanggung jawabkan (Ismail Nurdin, 2017 :4).

Nilai-nilai karakter pada sisi deontologis, teologis, maupun kontekstual tersebut telah terkristalisasi menjadi sila-sila dalam Pancasila yang kemudian dalam ortoparksisinya menjadi ideologi negara dimana pancasila sebagai ideologi berfungsi sebagai pengikat yang dapat menjamin persatuan bangsa indonesia (Mali Benyamin Mekhael, dkk, 2022 :321). Pada UU No. 5 Tahun 2014 berdasarkan perubahan UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara) mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan ASN, antaranya Hak, kewajiban, Fungsi, dan kewenangan lainnya. Juga diatur UU No. 20 Tahun 2023 Juga diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Batasan istilah ASN, diantaranya pengawasan, penetapan kebutuhan pegawai, kesejahteraan pegawai dan beberapa komponen kebutuhan ASN lainnya.

Pembinaan ASN yang menjadi semangat yang dibawa oleh kebijakan pemerintah dan diatur dalam UU/20/2014 yang membahas tentang bagaimana

membina ASN. Bahwa dalam pertimbangannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi integritas, menunjukkan profesionalisme, Memelihara

sikap imparial dan otonom dari intervensi politis, menjauhi praktik koruptif, kolusif, kemudian nepotik, menyelenggarakan servis publik yang berdaya guna bagi masyarakat, serta mengemban peran sebagai elite pemerintahan yang berperan sebagai fondasi persatuan bangsa berlandaskan Pancasila dan Konstitusi.

UU ASN juga mengatur pentingnya menjaga dan menjalankan nilai pancasila sebagai basis karakter seperti Pasal 3 menjadi dasar bahwa ASN harus taat terhadap Pancasila sebagai ideologi dan Pasal 4 huruf e angka 1, bahwa ASN harus loyal terhadap negara dengan menunjukkan dedikasinya dan Terus mengutamakan faedah untuk negeri sesuai dengan nilai dasar negara, yaitu tetap berpegang teguh pada Pancasila. Membentuk karakter berdasarkan Pancasila dalam tubuh ASN menjadi hal yang krusial agar tujuannya sesuai dengan pemetaan kepentingan negara. Sebagaimana dalam rilis survei Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 memperlihatkan sebanyak 19,4% ASN dibawah Kementerian Dalam Negeri menyatakan tidak setuju terhadap Pancasila. Berdasarkan data Kemenpan RB per juni 2019 jumlah ASN mencapai 4,2 juta dan jika dikonversi dari 19,4 % tersebut. Maka tidak sedikit ASN yang tidak menginginkan Ideologi Pancasila yaitu sekitar 814 ribu. (MPR RI dan Budi Sulistyono Kanang, 2020 :60).

Sebaliknya sebagai langkah preventif Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Politik kemudian Pemerintahan Umum, menjalankan fungsi Direktorat Bina Ideologi, Karakter, lalu Wawasan Kebangsaan, pada tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan guna menangkal praktik-praktik tidak jujur dan kehilangan integritas, membangkitkan etos kerja keras, daya saing, serta semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dan Nilai Kebangsaan. Serta Pengarahan Indonesia untuk mengutamakan rasa kesatuan yang

mempersatukan setiap warga negara yang berbangsa, beradat dan bernegara sesuai dengan cita-cita negara Indonesia. (Ditjen Politik dan PUM, 2024).

Tujuan pembentukan karakter terhadap ASN tersebut, dikarenakan ASN diserahkan tanggung jawab sebagai birokrat yang akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat baik barang maupun jasa, sesuai dengan aturan dan undang-undang. Contohnya, pertama, birokrasi (ASN) menyediakan servis barang, jasa, dan administrasi. Kedua, roda pemerintahan berputar untuk menjalankan fungsi

publik yang meliputi optimalisasi institusi, manajemen SDM, dan tata kelola. Ketiga, progres spesifik ditempuh melalui evolusi bangsa (pengembangan kultural dan politik) agar dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran setiap warga negara yang ada di Indonesia (Harsanto Nursadi, 2019: 57).

Disamping itu, adanya upaya pembinaan ASN dapat meliputi menumbuhkan komitmen kerja, kesadaran tim kerja, mampu mencapai standar prima, bersifat progresif dengan prediksi masa depan yang tepat, adanya motivasi serta etika pegawai (Muchlis Ari Handy, 2023 :98). pada bukunya Sastrohadiwiryono, dalam (Syamsir dan Nika Saputra, 2022: 55-56) menguraikan, dua model pembinaan yang pertama pembinaan moral kerja sebagai bentuk kesadaran terhadap tanggung jawabnya dan pembinaan disiplin kerja yang akan menjadi kebiasaannya. Implementasinya adalah pada pembangunan Pembentukan karakter holistik bertumpu pada tiga fondasi krusial. Pertama, resiliensi dibangun melalui strategi akar rumput. Kedua, habitat memengaruhi persepsi, nilai, dan perilaku individu. Ketiga, peningkatan performa memerlukan pendekatan yang proporsional.

Berdasarkan paparan di atas, maka begitu pentingnya pembinaan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di Direktorat Bina Ideologi, Karakter, kemudian Wawasan Kebangsaan Kemendagri RI berperan dalam memupuk disiplin dan moralitas kerja. Oleh

karena itu, dalam proposal riset ini, peneliti mengangkat tajuk riset: **“PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA PEMBENTUKAN KARAKTER APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERLANDASKAN PANCASILA”** (Studi di Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari elaborasi di atas, riset ini mengungkap dua fokus kajian.

Adapun formulasi problematiknya ialah :

1. Bagaimana peran kementerian dalam negeri dalam membentuk karakter aparatur sipil negara pada direktorat bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan yang berlandaskan pancasila ?
2. Bagaimana indikator keberhasilan pembentukan karakter aparatur sipil negara pada direktorat bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan, kementerian dalam negeri republik indonesia yang berlandaskan pancasila ?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tolak ukur pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian Ini Harapannya Agar Dapat Menjadi Sumbangsih Atau Referensi Pemikiran Sesuai Dengan Disiplin Keilmuannya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Adapun Dalam Hal Ini Beberapa Manfaat Pada Penelitian Sebagai Berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk memberikan pandangan baru dan memberikan referensi yang dapat menjadi penelitian selanjutnya baik untuk menyusun jurnal maupun untuk menyusun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *feedback* terhadap Lembaga pemerintahan, agar lebih memperhatikan kuantitas Aparatur Sipil Negara sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memperbanyak wawasan kemudian pengetahuan bagi riset terkait bagaimana mekanisme kemudian peran Kementerian pada Negeri pada pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan Pancasila.
- b. Dapat menjadi karya tulis bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata satu (S.1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- c. Guna meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, penulisan ini menjadi salah satu prasyarat.

### 1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Definisi konseptual memberikan batasan terhadap apa yang akan menjadi fokus dalam penelitian.

#### 1.4.1 Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri).

Entitas yang berkuasa dalam merumuskan serta memberlakukan regulasi di suatu area teritorial dikenal sebagai rezim pemerintahan (Fatih, 2014:13). Di sisi lain, servis publik mesti disalurkan pada khalayak selaras dengan hajat hidup mereka, dan pihak penguasa wajib mencukupi ekspektasi warga negara terkait

servis publik yang tak dikomersialisasikan (Talidzu Ndraha, 2011). Penerapan langkah-langkah ini akan mewujudkan interaksi resiprokal:

1. Rezim penguasa menyajikan beragam opsi komoditas bagi warga negara, yang mana tiap opsi tersebut memuat garansi tertentu.
2. Rezim penguasa menyajikan beragam opsi komoditas bagi warga negara, yang mana tiap opsi tersebut memuat garansi tertentu.
3. Negara menawarkan berbagai alternatif kepada publik, masing-masing disertai jaminan.
4. Guna menguji realisasi janji, konsumen menjalankan pengawasan sosial atas produk yang didapat.
5. Validasi realisasi komitmen dilakukan konsumen lewat kontrol sosial terhadap produk yang diterima.
6. Jika entitas produksi (rezim) akuntabel, maka konsumen (publik) menumbuhkan keyakinan terhadap komitmen entitas produksi (rezim).

#### 1.4.2 Karakter

Wyne mengutarakan bahwa tabiat individu merupakan refleksi responsnya dalam mengaplikasikan prinsip moral pada aktivitas harian (Yurniman Ndruru et al., 2024). Guna menunjang publik dalam mencapai target konstruksi karakter, pemerintah mengukuhkan pembenahan karakter sebagai inisiatif utama dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila kemudian Pembukaan UUD 1945 untuk mengatasi masalah kebangsaan sekarang. Selanjutnya Pendidikan karakter menjadi sesuatu akan menjadi contoh, dalam hal ini Pimpinan (Direktur), yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi karakter Aparatur Sipil Negara. Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan memengaruhi perilaku, bicara atau menyampaikan materi, toleransi, dan faktor lainnya yang dapat memberikan contoh kepada bawahannya (Aparatur Sipil Negara).

#### 1.4.3 Pembentukan Karakter

Menurut Gozali Saydam (2005) disiplin adalah kesediaan serta dedikasi individu untuk patuh pada regulasi yang berlaku di sekitarnya. Rezim pemerintahan

semestinya berpegang pada prinsip bahwa mentalitas disiplin krusial bagi konstruksi karakter bangsa, organisasi, serta individu. Kultur kerja ASN selaras dengan asas tata kelola pemerintahan yang apik serta merefleksikan nilai fundamental ASN demi mendongkrak kinerja dan mutu servis. Dalam menyusun proyeksi penyelenggaraan servis, ASN semestinya bertindak selaras dengan posisinya selaku aparatur negara yang memegang peranan esensial dalam penyelenggaraan pemerintah.

#### 1.4.4 Aparatur Sipil Negara

Pembinaan pegawai negeri sipil menurut Wursanto (1997:13) difokuskan pada:

1. Penempatan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah haruslah sesuai dengan tugasnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Menjamin bahwa semua pegawai negeri sipil didukung dalam pertumbuhan profesionalismenya melalui peraturan perundang-undangan yang konsisten.
3. Pembinaan pegawai negeri sipil melalui penggunaan kerangka kerja berbasis kinerja dan karier.
4. Penyusunan rencana kompensasi yang memperhitungkan besarnya tanggung jawab dan kinerja dalam pekerjaan.
5. Menetapkan tindakan disiplin yang tegas terhadap pegawai yang tidak menaati ketentuan tertulis.
6. Memperkuat prosedur pengawasan dan peningkatan system administrasi kepegawaian.
7. Ketujuh, memastikan bahwa semua warga negara selalu ingat untuk setia kepada negara, pemerintah, Pancasila, dan UUD 1945.

#### 1.4.5 Pancasila

Pancasila, selain menjadi orientasi serta fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara, juga merupakan ideologi formal NKRI. Salah satu ambisinya adalah realisasi masyarakat yang mengagungkan spiritualitas, humanisme, persatuan, demokrasi, dan ekuitas.

### 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional menunjang pengukuran variabel dalam riset. Lebih lanjut, definisi ini bermanfaat bagi riset lanjutan yang hendak memakai variabel identik. Definisi operasional variabel adalah elemen yang diseleksi oleh peneliti guna menghimpun data relevan dan menarik konklusi (Sugiyono, 2019:221). Berdasarkan konsep diatas bahwa penelitian ini lebih menekankan bagaimana upaya Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan dukungan materil maupun nonmateril kepada Aparatur Sipil Negara yang ada di direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan sebagai pembantu penyelenggaraan untuk menjalankan roda pemerintahan saat memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Penelitian menguraikan penegertian operasional sebagai berikut:

1. Formulasi hukum penyelenggaraan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam membentuk karakter Aparatur Sipil Negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan system yang mengacu pada kepentingan negara, sehingga dalam mendukung system penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka pemerintah harus memiliki prinsip pelayanan yang kredibel dan komprehensif dengan dasar hukum yang jelas dan pasti.
2. Pembentukan karakter ASN sebagai pelaksana pemerintahan, baik dalam servis administratif maupun teknis, difasilitasi Kemendagri melalui Direktorat Bina Ideologi, Karakter kemudian Wawasan Kebangsaan kepada lembaga serta masyarakat.
3. Bagaimana Integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar pengimplementasian pelayanan yang berorientasi pada “Core Values” ASN dengan Akronim “BerAKHLAK”, yaitu pelayanan yang Adaptif, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Loyal, Akuntabel. Yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebagai penggerak system pemerintahan, Aparatur Sipil Negara harus memiliki beberapa karakter seperti yang cetuskan oleh Kemenpan-RB tersebut sebagai identitas pelayanan yang berkarakter yang

dimiliki oleh ASN dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengimplementasian dan pelayanan kepada masyarakat.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Kajian mengaplikasikan pendekatan riset kualitatif. Data kualitatif diekspresikan secara verbal, bukan numerik (Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 2). Perangkat data kualitatif meliputi deskripsi komprehensif objek kajian, termasuk lokasi, riwayat, struktur organisasi, tujuan, sasaran, dan kondisi kerja karyawan. Peneliti dalam kajian mengaplikasikan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor ialah kajian menghimpun data deskriptif dari kata-kata maupun tindakan manusia, baik tertulis maupun verbal.

### 1.6.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum, Direktorat Bina Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan (BIKWK). Dalam hal ini peneliti menetapkan beberapa subjek dalam penelitian ini sebagai sumber informasi yang valid pada penelitian ini dengan melibatkan subjek sebagai berikut:

**Tabel 1 1 Sumber Informan**

No	Informan	Keterangan
1	Direktur Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, (BIKWK). (Drs. Drajat Wisnu Setyawan, M.M)	Keterlibatan Aparatur Sipil Negara terhadap kegiatan kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Visi Misi Presiden merupakan proses Pembentukan Karakter Aparatur Sipil Negara dengan melatih semua Aparatur yang ada di Direktorat BIKWK dengan menunjukkan sikap, pola pikir kemudian sikap pada memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Ideologi, Karakter kemudian Wawasan Kebangsaan)(BIKWK) ,Grafika Hardiany Parebong, SE	Pengelolaan rumah tangga Bina Ideologi, Karakter kemudian Wawasan Kebangsaan merupakan cara melatih Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan tanggung jawab secara administrative dan teknis agar menjaga kedisiplinannya, dan menunjukkan sikap profesionalnya serta menyediakan kebutuhan dalam memfasilitasi Pembinaan Karakter ASN oleh Bagian Tata Usaha sebagai

		pengelola rumah tangga Direktorat.
3	Kasubdirektorat Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Hamda, SH,M.Si	Penerapan dan penanaman nilai nilai Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara adalah hal yang sangat fundamental agar membentuk karakteristik Aparatur Sipil Negara agar ketika dalam berinteraksi dengan Pimpinan, sesama Aparatur, dapat menjaga integritas diri dan institusi dan juga dapat memberikan pelayanan yang terbuka dan bersentuhan langsung dengan bagaimana menyesuaikan dengan culture masyarakat.
4	Aparatur Sipil Negara/Staf yang ada dilingkungan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.	Pelayanan dengan cara berkolaborasi sesama Aparatur dapat mempermudah memberikan pelayanan. Hal itu agar Aparatur Sipil Negara saling mendukung bagaimana menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan program Kementerian Dalam Negeri juga dapat membangun pendekatan dengan masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang benar benar menjadi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkarakter dan nilai gotong royong sesuai dengan nilai dan makna Pancasila.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Informasi yang disampaikan oleh beberapa Informen/narasumber diatas dapat menjadi informasi valid yang memberikan gambaran deskriptif tentang bagaimana upaya pemerintah terhadap pembinaan karakter bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan penelitian tersebut yaitu; “Peran Kementerian Dalam Negeri Pada Pembentukan Karakter Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan Pancasila”.

### 1.6.3 Sumber Data

Data kualitatif pada riset ini bersumber dari ujaran dan tindakan, dilengkapi dokumen serta sumber lain (Lofland & Lofland dalam Moleong, 2013:157; Apriani Octavia, 2020). Berikut elaborasi mengenai kedua sumber riset yang digunakan, yaitu data primer kemudian data sekunder:

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yakni data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### 1) Data primer

Data primer ialah data yang diterima langsung oleh pengumpul data dari sumber orisinalnya. Peneliti menghimpun data, baik di lokasi riset maupun dari sumber utama (Sugiyono, 2018:456; Yusnidar Lase et al, 2023).

#### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah tersedia di entitas lain. Uma Sekaran (2011) dan Siti Nur Hasanah et al. (2022) sepakat mencantumkan dokumen pemerintah, laman web, analisis industri dari media, serta catatan atau dokumen perusahaan sebagai sumber.

### 1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di lingkungan Bina Wawasan Kebangsaan, Direktorat Pembinaan Ideologi, serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta.

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Teknik Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pustaka sebagai metode riset melibatkan aktivitas membaca, menganalisis, serta membuat catatan atas berbagai sumber relevan. Pasca-pengumpulan data, dilakukan sortasi dan penataan berdasarkan parameter teoretis yang telah ditetapkan (Kartini Kartono, 1998:78). Pada penelitian ini library research sebagai pengumpulan data melalui berbagai literatur untuk melengkapi penelitian tentang Peran Kemendagri Pada Pembentukan Karakter Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan Pancasila. Dengan mengumpulkan literatur tentang peran pemerintah, karakter, Aparatur Sipil Negara, dan Pancasila untuk mengkaji dan menganalisis sesuai dengan fokus penelitian tersebut.

#### b. Mengakses *Website*

Teknik ini diimplementasikan melalui penjelajahan laman web yang memuat jurnal maupun karya tulis terkait judul penelitian. Pada penelitian ini akses terhadap website sebagai sumber informasi atau berita yang valid sebagai data informasi tentang Peran Kementerian Dalam Negeri Pada Pembentukan Karakter Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pancasila.

#### c. Observasi

Observasi kerap dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpulan data dalam riset kualitatif. Jenis observasi fundamental melibatkan pendataan via indra penglihatan, penciuman, dan pendengaran guna menjawab pertanyaan riset. Data observasi mencakup tindakan, insiden, objek, situasi, hingga ekspresi wajah. Observasi kejadian riil lazim diterapkan guna mendapatkan landasan pertanyaan riset. Riset ini mengadopsi pendekatan observasi langsung untuk menelisik karakter pemberian layanan publik oleh ASN di Divisi Pembinaan Ideologi,

## Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Administrasi umum

### d. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi catatan, transkrip, terbitan berkala, serta risalah rapat, dapat menjadi sumber data (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Metode ini dipergunakan untuk menyusun data yang dihimpun dari aneka sumber, semisal tinjauan pustaka, catatan lapangan, dan sumber daring. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini penelitian tentang Peran Kementerian Dalam Negeri pada Pembentukan Karakter Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan Pancasila merupakan validasi hasil dari data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.

### 1.6.6 Analisa Data

Miles dan Huberman, analisis data meliputi tiga alur kegiatan simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Miles & Huberman, 1992:16). Berikut penjelasannya:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data, pasca pengumpulan data mentah dari catatan lapangan, mencakup seleksi, fokus, simplifikasi, abstraksi, dan transformasi informasi. Proses ini mencakup penyederhanaan, klasifikasi, serta eliminasi data, dengan tujuan menyajikan informasi yang relevan untuk perumusan kesimpulan.

#### b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai rangkaian fakta yang memfasilitasi peneliti dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan temuan. Aspek krusial dari penyusunan hasil riset adalah memastikan presentasi data yang logis dan relevan untuk menjawab pertanyaan riset.

#### c. Verifikasi Data Atau Kesimpulan

Verifikasi data atau pembentukan kesimpulan, menurut Miles dan Huberman, merupakan esensi dari keseluruhan proses riset. Kesimpulan dirumuskan setelah telaah kerangka teoretis berdasarkan topik riset.

### 1.7 Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti biasanya dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Adapun waktu penelitian ini ada pada table ini:

**Tabel 1 2 Jadwal Penelitian**

Bentuk kegiatan		Bulan						
No	Uraian Kegiatan	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Sep 2023	Oktober 2023	Nov 2023	Des 2023
1	Penyusunan Proposal Penelitian							
2	Seminar Proposal Penelitian							
3	Pengumpulan Data Penelitian							
4	Pengolahan Hasil Penelitian							
5	Seminar Hasil Penelitian							
6	Penyusunan Skripsi							